SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mikael, S.IP., M.AP.
Jabatan : Kepala Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. Mohammad Iqbal, S.IK., M.M.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPD RI
selaku Sekretaris Jenderal DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
H. Mohammad Iqbal, S.IK., M.H.	Mikael, S.IP., M.AP.
NRP. 70070207	NIP. 198705282007011003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA KANTOR DPD RI DI IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Persentase Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang sesuai dengan kewenangan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Kalimantan Utara	100%
2	Terwujudnya Pengelolaan Data terkait Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi terkait Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Kalimantan Utara	100%
3	Terwujudnya tata kelola DPD RI di Ibukota Provinsi yang efektif	Persentase terlaksananya dukungan manajemen Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Kalimantan Utara	100%

		Kegiatan / RO		Anggaran
A.		**Pengelolaan Program Dukungan Dewan di Daerah Pemilihan**	**Rp**	**-**
	1	001 - Laporan Materi Pengolahan Asmasda	Rp	-
	2	007 - Laporan atas Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda	Rp	-
B.		**Pengelolaan Program Dukungan Manajemen di Daerah Pemilihan**	**Rp**	**129.500.000**
	1	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp	-
	2	959 - Layanan Protokoler	Rp	-
	3	962 - Layanan Umum	Rp	-
	4	994 - Layanan Perkantoran	Rp	129.500.000
	5	951 - Layanan Sarana Internal	Rp	-
	6	971 - Layanan Prasarana Internal	Rp	-

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.	Mikael, S.IP., M.AP.
NRP. 70070207	NIP. 198705282007011003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).